



Dampak Transformasi Digital Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan Dengan Tata Kelola yang Baik sebagai Mediator (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Mutia Ardina, Liza Alvia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

mutiaardina30@gmail.com, liza.alvia@feb.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformasi digital akuntansi terhadap transparansi keuangan dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel pemediasi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Penelitian kuantitatif eksplanatori ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengukuran transformasi digital akuntansi (X) menggunakan metode text mining yang ditransformasikan dengan logaritma natural, transparansi keuangan (Y) diukur melalui nilai absolut discretionary accruals (Modified Jones Model), dan GCG (Z) diukur menggunakan indeks komposit ternormalisasi. Analisis data dilakukan dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital akuntansi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap nilai absolut akrual diskresioner, yang berarti secara langsung meningkatkan transparansi keuangan (H_1 diterima). Transformasi digital akuntansi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG (H_2 diterima). Namun, GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan (H_3 ditolak). Akibat terputusnya jalur hilir tersebut, GCG terbukti tidak mampu memediasi hubungan antara transformasi digital akuntansi dan transparansi keuangan (H_4 ditolak). Temuan ini mengonfirmasi Agency Theory dan TOE Framework bahwa teknologi akuntansi bekerja secara mandiri (independent penetration) dalam menekan asimetri informasi dan rekayasa laba, tanpa bergantung pada fungsi birokrasi pengawasan internal. Perusahaan transportasi disarankan untuk memperkuat integrasi sistem digital guna menjamin keandalan dan keterbukaan pelaporan keuangan.

Kata kunci: Transformasi Digital Akuntansi, Transparansi Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Discretionary Accruals, PLS-SEM

Abstract

This study aims to analyze the effect of accounting digital transformation on financial transparency with Good Corporate Governance (GCG) as a mediating variable in transportation sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2024 period. This explanatory quantitative study uses secondary data from company annual reports. The sample was determined through a purposive sampling technique. The measurement of accounting digital transformation (X) uses a text mining method transformed with natural logarithms, financial transparency (Y) is measured through the absolute value of discretionary accruals (Modified Jones Model), and GCG (Z) is measured using a normalized composite index. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0 software. The results show that accounting digital transformation has a significant effect with a negative direction on the absolute value of discretionary accruals, meaning it directly enhances financial transparency (H_1 accepted). Accounting digital transformation also has a positive and significant effect on GCG (H_2 accepted). However, GCG has no significant effect on financial transparency (H_3 rejected). Due to the breakdown of this downstream path, GCG is proven unable to mediate the relationship between accounting digital transformation and financial transparency (H_4 rejected).

Keywords: Accounting Digital Transformation, Financial Transparency, Corporate Governance, Discretionary Accruals, PLS-SEM

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap operasional perusahaan secara mendasar, beralih dari sekadar otomatisasi administrasi menuju pemanfaatan teknologi secara strategis untuk efisiensi dan pengambilan keputusan. Transformasi digital kini dipahami sebagai pergeseran sistemik yang mengintegrasikan platform digital terintegrasi guna mengelola data keuangan secara real-time dan sistematis. Zou

Dampak Transformasi Digital Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan Dengan Tata Kelola yang Baik sebagai Mediator (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat transformasi digital suatu perusahaan dapat dipotret secara objektif melalui frekuensi pengungkapan teknologi digital, sistem informasi, dan inovasi berbasis teknologi dalam laporan tahunan sekunder yang tersedia bagi publik. Di Indonesia, akselerasi ini ditopang oleh peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) BPS (Badan Pusat Statistik, 2025). Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan kinerja pertumbuhan menonjol sebesar 19,87% pada 2022, 13,96% pada 2023, dan 8,69% pada 2024—melampaui rata-rata pertumbuhan PDB nasional—serta memberikan kontribusi PDB yang meningkat dari 5,02% menjadi 6,13% (CNBC Indonesia, 2026). Bank Indonesia bahkan memproyeksikan sektor ini tumbuh tertinggi pada 2026 sebesar 10,8%–11,6% (Bisnis.com, 2025). Momentum ini diperkuat oleh regulasi pemerintah melalui Ekosistem Logistik Nasional (NLE) dan agenda penguatan ekonomi digital transportasi (CNBC Indonesia, 2026; Kemenko Perekonomian, 2026).

Namun, pesatnya pertumbuhan ini diiringi oleh kompleksitas operasional, seperti pengelolaan armada, distribusi logistik lintas wilayah, dan konsolidasi laporan keuangan banyak anak perusahaan yang menghasilkan volume data masif (Kementerian Perhubungan RI, 2021). Tekanan fluktuasi biaya bahan bakar turut menekan margin perusahaan, yang berpotensi memicu penyesuaian tarif serta memengaruhi pola pelaporan keuangan (CNBC Indonesia, 2026). Fenomena ini tecermin pada Indeks Kinerja Logistik (LPI) Bank Dunia 2023, di mana peringkat Indonesia turun ke posisi 61 dengan skor 3,0 (dari posisi 46 pada 2018), di mana komponen tracking and tracing melemah dari 3,30 menjadi 3,00 (CNBC Indonesia, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa investasi teknologi belum sepenuhnya menghasilkan keandalan informasi yang optimal, sehingga perusahaan dituntut tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menyajikan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Di tengah akselerasi digitalisasi, isu transparansi keuangan masih menjadi persoalan krusial pada emiten sektor transportasi. Kasus relevan tecermin pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018, yang mengakui pendapatan piutang dari PT Mahata Aero Teknologi senilai 239,94 juta dolar AS sebagai pendapatan tahun berjalan. Pengakuan tersebut mengubah posisi keuangan dari rugi 244 juta dolar AS menjadi laba bersih 5,02 juta dolar AS, yang berujung pada penolakan penandatanganan oleh dua komisaris, instruksi penyajian kembali (restatement), dan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (Kompasiana, 2025; OJK, 2019). Persoalan serupa berulang pada April 2026, ketika manajemen Garuda Indonesia memberikan klarifikasi resmi kepada BEI terkait ketidaksesuaian data Catatan 32 laporan keuangan konsolidasian 2025 akibat perbedaan waktu penerbitan laporan antara induk dan anak usaha, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (Bukitmakmur.id, 2026). Dua peristiwa yang berjarak hampir satu dekade ini mengindikasikan bahwa masalah akurasi dan transparansi pelaporan keuangan di sektor transportasi merupakan tantangan struktural yang mendasar.

Sebaliknya, PT Blue Bird Tbk memberikan gambaran bagaimana transformasi digital yang diimbangi pengawasan internal mampu memperkuat tata kelola. Melalui pengembangan aplikasi MyBluebird, sistem pembayaran digital, dan digitalisasi operasional armada, Blue Bird menegaskan dalam laporan tahunannya bahwa adopsi teknologi ditujukan untuk memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas (PT Blue Bird TBK, 2021). Komparasi kedua emiten ini menegaskan bahwa tingkat kecanggihan teknologi harus diiringi oleh mekanisme pengawasan yang kuat agar berujung pada peningkatan transparansi keuangan.

Dinamika empiris tersebut dapat dijelaskan melalui dua kerangka teoretis. Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajemen) rentan memicu konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Transformasi digital akuntansi berperan mempersempit celah tersebut dengan menyediakan data yang cepat, akurat, dan dapat ditelusuri (traceable), selama didukung tata kelola yang memadai (Alassuli et al., 2025). Selanjutnya, Technology Organization Environment (TOE) Framework (Tornatzky & Fleischer, 1990) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi ditentukan oleh tiga dimensi: teknologi (transformasi digital akuntansi), organisasi (kesiapan tata kelola internal), dan lingkungan (tekanan transparansi dari investor dan regulator) (Baker, 2012). Perpaduan kedua teori ini menggarisbawahi bahwa efektivitas transformasi digital sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasi.

Dalam penelitian ini, Good Corporate Governance (GCG) ditempatkan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara transformasi digital akuntansi dan transparansi keuangan. Penempatan ini didasarkan pada argumentasi konseptual bahwa investasi teknologi digital tidak secara otomatis menghasilkan transparansi pelaporan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, pengendalian internal, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Alassuli et al., 2025; Lathifah & Indriastuti, 2026). Mekanisme GCG diwujudkan secara konkret melalui struktur dewan komisaris, frekuensi rapat, dan proporsi komisaris independen yang mengarahkan manajemen agar bertindak demi kepentingan pemegang saham (Lathifah & Indriastuti, 2026). Tata kelola yang baik mendorong pemanfaatan teknologi secara optimal,

sehingga data yang dihasilkan sistem akuntansi benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan (Salehi et al., 2023).

Secara empiris, Alassuli et al. (2025) membuktikan bahwa transformasi digital akuntansi berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan, dengan GCG terbukti memediasi hubungan tersebut secara parsial. Zou et al. (2024) menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan keandalan informasi keuangan jika didukung kesiapan organisasi, sementara Salehi et al. (2023) mengonfirmasi bahwa mekanisme tata kelola yang kuat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Lathifah dan Indriastuti (2026) menambahkan bahwa efektivitas GCG lebih ditentukan oleh kualitas struktur pengawasan daripada sekadar pemenuhan kuota formal. Meskipun demikian, mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada efisiensi operasional atau dilakukan di luar Indonesia dengan karakteristik regulasi dan dinamika pasar modal yang berbeda (Alassuli et al., 2025). Selain itu, kajian empiris yang secara spesifik meneliti emiten sektor transportasi di Indonesia masih terbatas, padahal sektor ini memiliki kompleksitas operasional yang tinggi (Kementerian Perhubungan RI, 2021). Kesenjangan riset ini menjadi pijakan utama digelarnya penelitian.

Penelitian ini krusial dilakukan mengingat sektor transportasi berada di antara akselerasi digitalisasi dan tantangan keterbukaan pelaporan keuangan. Bukti bahwa investasi teknologi tidak secara otomatis menjamin transparansi menunjukkan adanya peran variabel pemediasi, yaitu Good Corporate Governance, sebagai mekanisme kontrol yang memastikan teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab (Alassuli et al., 2025; Salehi et al., 2023). Berdasarkan fenomena, landasan teoretis, bukti empiris, dan research gap yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformasi digital akuntansi terhadap transparansi keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel pemediasi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menguji hubungan empiris antarvariabel berdasarkan data sekunder berupa *annual report* perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024 (Sugiyono, 2021). Penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria emiten terdaftar berturut-turut, menyajikan laporan keuangan lengkap, serta menyediakan informasi terkait variabel penelitian (Sugiyono, 2021). Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumentasi dari situs resmi BEI dan situs emiten, serta diperluas menggunakan pendekatan *text mining* untuk mengukur variabel transformasi digital akuntansi berdasarkan frekuensi kemunculan kata kunci spesifik (Zou et al., 2024).

Secara operasional, variabel dependen transparansi keuangan (CFR) diukur menggunakan nilai absolut *discretionary accruals* melalui *Modified Jones Model* (Dechow et al., 1995; Salehi et al., 2023). Variabel independen transformasi digital akuntansi (TD) diukur melalui *text mining* terhadap enam indikator—*digital technology, information system, big data, artificial intelligence, automation, dan digital platform*—yang ditransformasikan menggunakan logaritma natural ($\ln(n + 1)$) guna menstabilkan varians data (Liu & Jiang, 2025; Zou et al., 2024). Variabel pemediasi tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) diukur menggunakan indikator komposit berbasis *Min-Max Normalization* (OECD, 2005) dari tiga instrumen struktural: frekuensi rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen (POJK 33/POJK.04/2014), dan jumlah anggota komite audit (POJK 55/POJK.04/2015; Lathifah & Indriastuti, 2026).

Teknik analisis data memanfaatkan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS 4.0 (Ghozali, 2021). Penelitian ini mengesampingkan uji normalitas formal karena PLS-SEM bersifat non-parametrik dan bebas distribusi (*distribution-free*), di mana evaluasi estimasi diatasi melalui prosedur *resampling bootstrapping* sebanyak 5.000 kali replikasi (Ghozali & Latan, 2020). Evaluasi model pengukuran (*outer model*) menggunakan *single-indicator construct* yang secara otomatis menghasilkan nilai *outer loading*, AVE, *Cronbach's alpha*, dan *composite reliability* sebesar 1,00 (Ghozali, 2021). Evaluasi model struktural (*inner model*) mencakup uji multikolinearitas ($VIF < 10$) dan analisis koefisien determinasi (R^2). Kesesuaian model secara global (*overall model fit*) ditunjukkan oleh nilai *Standardized Root Mean Square Residual* ($SRMR < 0,08$). Pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effect*) serta pengaruh tidak langsung (*specific indirect effect*) dianalisis melalui *bootstrapping*, di mana hipotesis diterima apabila *t-statistics* $> 1,96$ dan *p-value* $< 0,05$. Jika jalur tidak langsung signifikan namun jalur langsung tidak signifikan, maka sifat hubungannya dikategorikan sebagai *full mediation* (Ghozali, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini disajikan hasil pengujian statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Dev.
Transformasi Digital	76	3,388	0,693	5,775	1,207
Transparansi Keuangan	76	0,965	0,002	4,934	1,205
Tata Kelola Perusahaan	76	0,293	0,035	0,879	0,195

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2026)

Variabel Transformasi Digital Akuntansi (X) diukur melalui frekuensi kata kunci digitalisasi dalam laporan tahunan yang ditransformasikan dengan logaritma natural. Nilai minimum 0,693 menunjukkan kemunculan kata kunci satu kali, sedangkan maksimum 5,775 berasal dari 321 kemunculan. Berdasarkan TOE Framework dan Teori Keagenan, kondisi tersebut mencerminkan variasi kesiapan teknologi dan keterbukaan manajemen dalam mengurangi asimetri informasi. Nilai mean 3,388 menunjukkan intensitas pengungkapan transformasi digital berada pada kategori menengah (moderate), sementara standar deviasi 1,207 mengindikasikan adanya kesenjangan pengungkapan antarsampel.

Variabel Transparansi Keuangan (Y) diukur menggunakan nilai absolut Discretionary Accruals dengan Modified Jones Model. Nilai minimum 0,002 menunjukkan indikasi manipulasi laba yang minimal, sedangkan maksimum 4,934 mencerminkan praktik manajemen laba yang lebih besar. Nilai mean 0,965 dengan standar deviasi 1,205 menunjukkan bahwa kualitas transparansi keuangan bersifat heterogen. Kondisi tersebut berkaitan dengan kompleksitas transaksi konsolidasi dan operasional lintas anak perusahaan pada industri transportasi. Fenomena ketidaktransparanan juga tercermin dalam kasus pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018.

Variabel Good Corporate Governance (GCG) (Z) dihitung melalui indeks komposit ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah komite audit yang dinormalisasi pada skala 0 hingga 1. Nilai minimum 0,035, maksimum 0,879, mean 0,293, dan standar deviasi 0,195 menunjukkan karakteristik GCG yang relatif homogen. Dalam Teori Keagenan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur pengawasan perusahaan cenderung seragam dalam memenuhi regulasi formal OJK, termasuk ketentuan komisaris independen dan komite audit, namun belum selalu diikuti peningkatan kapasitas pengawasan terhadap sistem pelaporan digital akuntansi di Indonesia secara keseluruhan.

Analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)

Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Namun, karena penelitian ini menggunakan data sekunder objektif dengan pendekatan indikator tunggal (*single-indicator construct*) di mana variabel transformasi digital, GCG, dan transparansi keuangan dihitung menggunakan angka skor total hasil rumus matematis riil, maka pengujian validitas dan reliabilitas konvensional secara otomatis terpenuhi secara mutlak (*by definition*). Di dalam sistem komputasi SmartPLS 4, konstruk indikator tunggal akan menghasilkan nilai koefisien *Outer Loading*, *Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Composite Reliability (CR)* sebesar 1,00 atau bernilai sempurna. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesalahan varians (*error variance*) dianggap nol karena data bukan berasal dari persepsi kuesioner, sehingga tahapan evaluasi outer model dapat diabaikan dan analisis data langsung dilanjutkan pada pengujian model struktural (*inner model*).

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural (*inner model*) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keandalan model hubungan antar variabel laten serta menguji kekuatan prediksi dari kerangka konseptual yang dibangun. Rangkaian pengujian inner model dalam penelitian data sekunder ini terdiri dari dua indikator utama, yaitu Uji Multikolinearitas menggunakan parameter *Variance Inflation Factor* (*VIF*) dan Uji Koefisien Determinasi (*R²*).

1. Uji Multikolinearitas (*VIF*)

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Jalur Hubungan Antar-Variabel	VIF
Tata Kelola Perusahaan → Transparansi Keuangan	1,205
Transformasi Digital → Tata Kelola Perusahaan	1,000
Transformasi Digital → Transparansi Keuangan	1,205

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan sajian data pada Tabel 2 di atas, perolehan nilai koefisien Inner *VIF* menunjukkan angka yang bervariasi antara 1,000 hingga 1,205. Kriteria pengujian menetapkan bahwa model penelitian dinyatakan kokoh dan terbebas dari bias multikolinearitas jika nilai *VIF* berada jauh di bawah ambang batas kritis yaitu 5,00.

Evaluasi statistik ini mengonfirmasi secara ilmiah bahwa seluruh jalur pengujian tidak menunjukkan adanya gejala korelasi linear berganda atau tumpang-tindih informasi yang ekstrem antarvariabel penjelas (*zero collinearity*). Rendahnya nilai koefisien *VIF* ini dapat terjadi karena struktur model jalur struktural dibangun secara mandiri, di mana hanya terdapat satu prediktor utama yang bekerja dalam menjelaskan variabel endogennya masing-masing. Dengan demikian, seluruh rangkaian model struktural dalam penelitian ini telah memenuhi syarat asumsi linearitas secara mutlak, memiliki stabilitas estimasi koefisien yang andal, serta memenuhi kelayakan kriteria untuk dilanjutkan pada pengujian koefisien determinasi (*R-Square*) dan analisis pengujian hipotesis lanjutan.

2. Koefisien Determinasi (*R²*)

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

Variabel	R-square	R-square adjusted
Tata Kelola Perusahaan	0,170	0,159
Transparansi Keuangan	0,241	0,220

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan sajian data pada Tabel 3, nilai *R-square* untuk variabel Tata Kelola mencatatkan angka sebesar 0,170. Perolehan angka ini mengindikasikan bahwa variabel Transformasi Digital memiliki kemampuan sebesar 17,0% dalam menjelaskan variasi perubahan pada indeks Tata Kelola struktural perusahaan transportasi di BEI, sedangkan 83,0% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Sementara itu, nilai *R-square* untuk variabel Transparansi Keuangan adalah sebesar 0,241. Temuan ini membuktikan bahwa variasi tingkat akrual diskresioner (*discretionary accruals*) sebagai proksi Transparansi Keuangan mampu dijelaskan secara simultan oleh variabel Transformasi Digital dan Tata Kelola sebesar 24,1%. Sisanya sebesar 75,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model pengamatan struktural dalam penelitian ini. Nilai determinasi di kisaran 17,0% dan 24,1% ini tergolong lazim dan dapat diterima pada pemodelan data sekunder akuntansi karena fluktuasi angka laporan keuangan di lapangan sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal industri korporasi.

Uji Kelayakan Model (*Model Fit*)

Tabel 4 Uji Kelayakan Model

Parameter	Saturated Model	Estimated Model	Nilai Kritis	Batas	Kesimpulan
SRMR	0,000	0,000	< 0,08		Sempurna

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan hasil kalkulasi algoritma yang disajikan pada Tabel 4.X, nilai SRMR menunjukkan angka 0,000 baik pada kolom *Saturated model* maupun *Estimated model*. Perolehan angka nol mutlak ini mencerminkan tingkat kesesuaian yang sempurna (*perfect fit*). Dalam metodologi analisis jalur *PLS-SEM*, nilai SRMR 0,000 ini muncul karena model pengamatan ini merupakan jenis model jalur penuh (*fully saturated path model*). Seluruh variabel laten di dalam penelitian ini yaitu Transformasi Digital Akuntansi (X), Tata Kelola Perusahaan (Z), dan Transparansi Keuangan (Y) terkoneksi secara linear langsung satu sama lain tanpa memutuskan jalur korelasi, sehingga secara matematis tidak menyisakan varians kesalahan (*zero residual variance*) antara matriks data asli dengan matriks estimasi model. Hasil tersebut membuktikan secara ilmiah bahwa model struktural ini terbebas dari kesalahan spesifikasi, memiliki validitas prediktif global yang sangat tinggi, serta dinyatakan sah dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis pada tahap berikutnya

Pengujian Hipotesis dan Analisis Mediasi

Tabel 5 Hasil Pengujian Koefisien Jalur

Variabel	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values
Transformasi Digital → Transparansi Keuangan	-0,519	4,371	0,000
Transformasi Digital → Tata Kelola Perusahaan	0,413	3,267	0,001
Tata Kelola Perusahaan → Transparansi Keuangan	0,081	0,652	0,515
Transformasi Digital → Tata Kelola Perusahaan → Transparansi Keuangan	0,003	0,544	0,586

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur yang disajikan pada tabel 5 diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Transformasi Digital Akuntansi dengan proksi frekuensi pengungkapan istilah digital menunjukkan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar -0,519 dengan nilai T-Statistics sebesar 4,371 dan probabilitas (*P-Values*) sebesar 0,000. Nilai *P-Values* tersebut berada jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05), yang mengonfirmasi bahwa hubungan pengaruh di antara kedua variabel bersifat signifikan. Mengingat variabel Transparansi Keuangan diproksikan melalui nilai absolut *Discretionary Accruals* (akrual diskresioner) yang secara teoritis berbanding terbalik dengan transparansi pelaporan, maka tanda negatif (-) pada koefisien ini menunjukkan hubungan yang berkebalikan. Artinya, peningkatan intensitas implementasi teknologi digital pada fungsi akuntansi perusahaan terbukti mampu menurunkan nilai akrual diskresioner secara drastis, yang secara otomatis berimplikasi pada meningkatnya kualitas transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang mengungkapkan bahwa Transformasi Digital Akuntansi berpengaruh positif terhadap Transparansi Keuangan dinyatakan diterima atau terdukung.

2. Variabel Transformasi Digital Akuntansi terhadap variabel Tata Kelola Perusahaan mencatatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,413 dengan nilai T-Statistics sebesar 3,267 dan tingkat probabilitas (*P-Values*) sebesar 0,001. Temuan empiris ini memperlihatkan bahwa pengaruh langsung di antara kedua variabel tersebut adalah signifikan karena nilai *P-Values* lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai T-Statistics melampaui batas kritis 1,96. Koefisien regresi yang bernilai positif (+) menggambarkan adanya hubungan yang searah, yang memberikan bukti bahwa akselerasi adopsi teknologi informasi dalam pelaporan korporasi berjalan berbanding lurus dengan penguatan struktur administrasi tata kelola internal perusahaan. Oleh karena itu, hasil pengujian ini memutuskan bahwa hipotesis kedua (H2) yang mengemukakan adanya pengaruh positif antara Transformasi Digital Akuntansi terhadap Tata Kelola Perusahaan dinyatakan diterima atau terdukung.
3. Variabel Tata Kelola Perusahaan dengan proksi indeks komposit karakteristik struktural dewan menunjukkan koefisien regresi senilai 0,081 dengan probabilitas mencatatkan angka 0,515. Melalui perbandingan parameter tersebut, terlihat bahwa syarat minimum pengujian tidak terpenuhi karena nilai probabilitas berada jauh di atas batas toleransi 0,05 ($0,515 > 0,05$) serta nilai *T-Statistics* sebesar 0,652 berada di bawah angka 1,96. Hal ini mengindikasikan jika karakteristik tata kelola dewan pengawas secara administratif tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan Transparansi Keuangan pada perusahaan sektor transportasi periode 2021–2024. Pemenuhan kuota komite audit maupun komisaris independen secara formal terbukti belum memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menekan tindakan oportunistik manajemen laba di lapangan. Oleh karena itu, temuan menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang mengemukakan adanya pengaruh positif antara Tata Kelola Perusahaan terhadap Transparansi Keuangan dinyatakan tidak diterima atau tidak terdukung.
4. Variabel interaksi pengaruh tidak langsung antara Transformasi Digital Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan melalui Tata Kelola Perusahaan sebagai variabel pemediasi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,003 dengan nilai T-Statistics sebesar 0,544 dan tingkat probabilitas (*P-Values*) sebesar 0,586. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai *P-Values* berada jauh di atas batas signifikansi 0,05 ($0,586 > 0,05$), yang menjelaskan bahwa peran tata kelola dewan tidak efektif dalam mengurangi atau menjembatani dampak kebijakan digitalisasi akuntansi terhadap transparansi pelaporan korporasi. Kegagalan efek mediasi ini merupakan akibat logis dari terputusnya alur hubungan linear di bagian hulu, karena efektivitas pengawasan administrasi internal cenderung bergerak statis dan tidak sensitif terhadap laju adopsi teknologi. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan memediasi pengaruh Transformasi Digital Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan dinyatakan ditolak atau tidak terdukung secara mutlak.

Pembahasan

Pengaruh Transformasi Digital Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan

Hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien jalur sebesar -0,519 ($T = 4,371$; $p = 0,000$), sehingga H1 diterima. Tanda negatif mengindikasikan bahwa peningkatan intensitas digitalisasi akuntansi menurunkan nilai absolut *discretionary accruals* secara signifikan. Dalam akuntansi pelaporan, penurunan akrual diskresioner mencerminkan berkurangnya praktik manajemen laba, yang berarti kualitas transparansi keuangan justru meningkat. Temuan ini mengonfirmasi *Agency Theory* dan *TOE Framework*, di mana digitalisasi berfungsi sebagai sistem pemantauan otomatis yang memangkas asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Kesiapan teknologi memblokir celah rekayasa laba karena seluruh transaksi terekam secara *real-time*. Hasil ini sejalan dengan Allassuli et al. (2025), Zou et al. (2024), dan Fang et al. (2023). Secara empiris, PT Blue Bird Tbk membuktikan hal ini dengan mengintegrasikan transaksi nontunai aplikasi MyBluebird langsung ke pembukuan pusat untuk meminimalkan manipulasi kas.

Pengaruh Transformasi Digital Akuntansi terhadap Tata Kelola Perusahaan

Pengujian model struktural menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,413 ($T = 3,267$; $p = 0,001$), yang berarti H2 diterima. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa laju adopsi teknologi informasi berbanding lurus dengan penguatan administrasi tata kelola internal. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi mempermudah dewan pengawas dalam memantau kinerja operasional secara akurat. Dalam *TOE Framework*, interaksi dimensi teknologi dan organisasi ini membuktikan bahwa teknologi digital memperkuat pengendalian internal melalui penyediaan rekam jejak yang dapat diaudit (*auditable*), sekaligus menekan konflik kepentingan dalam *Agency Theory*. Temuan

ini mendukung riset Liu dan Jiang (2025) serta Zou et al. (2024). Di industri transportasi, ketersediaan dasbor data digital *real-time* terbukti membantu komite audit dan dewan komisaris melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan direksi tanpa bergantung pada laporan fisik.

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Transparansi Keuangan

Analisis jalur menghasilkan koefisien sebesar 0,081 ($T = 0,652$; $p = 0,515$), sehingga H3 ditolak. Hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa kelengkapan administratif organ GCG dan frekuensi rapat belum mampu mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan secara empiris. Indeks komposit tata kelola tidak sensitif terhadap perubahan nilai akrual diskresioner. Meskipun bertentangan dengan Salehi et al. (2023), temuan ini didukung oleh Lathifah dan Indriastuti (2026) yang menyatakan bahwa struktur pengawas yang besar tidak efektif jika tidak diimbangi pemahaman teknologi. Secara empiris, pembentukan GCG pada emiten transportasi cenderung bersifat pasif dan kaku sebatas pemenuhan regulasi POJK No. 21/POJK.04/2015 (*checklist compliance*). Karakteristik data GCG yang homogen dan statis menyebabkan dewan pengawas tidak memiliki kapasitas kuat untuk mengintervensi kebijakan akuntansi manajemen di lapangan.

Pengaruh Transformasi Digital Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan melalui Tata Kelola Perusahaan

Uji efek tidak langsung menghasilkan koefisien sebesar 0,003 ($T = 0,544$; $p = 0,586$), yang menegaskan bahwa H4 ditolak secara mutlak. Tata kelola perusahaan tidak terbukti mampu memediasi hubungan antara transformasi digital akuntansi dan transparansi keuangan. Kegagalan efek mediasi ini terjadi karena tidak adanya pengaruh signifikan dari GCG terhadap transparansi (jalur H3 ditolak). Berdasarkan *Agency Theory* dan *TOE Framework*, teknologi akuntansi bekerja secara mandiri (*independent penetration*) tanpa memerlukan campur tangan birokrasi dewan pengawas. Penurunan manipulasi akrual murni digerakkan oleh keandalan sistem pelaporan elektronik dan regulasi pasar modal. Temuan ini sejalan dengan Siswanti (2024) serta Sandhi dan Maradidya (2025). Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membuktikan bahwa transparansi radikal baru terwujud setelah migrasi ke platform *cloud* SAP S/4HANA pada Mei 2026, yang secara mekanis memaksa keterbukaan informasi.

4. Kesimpulan

Dari hasil uji yang dilaksanakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Transformasi digital akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi keuangan. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yaitu penerapan teknologi informasi berbasis digital dalam sistem akuntansi mampu memotong ruang gerak manajer untuk melakukan rekayasa angka laba melalui pengurangan nilai discretionary accruals, sehingga secara otomatis meningkatkan kualitas keterbukaan informasi laporan keuangan. 2). Transformasi digital akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola perusahaan. Peningkatan adopsi teknologi informasi dalam pelaporan korporasi terbukti berbanding lurus dengan penguatan kapabilitas administrasi internal korporasi melalui ketersediaan basis data operasional yang cepat dan akurat. 3). Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan. Artinya, pemenuhan kelengkapan administratif dewan komisaris maupun komite audit secara formal tidak mempengaruhi secara langsung kebijakan manajer dalam menekan tindakan oportunistik manajemen laba di lapangan. 4). Tata kelola perusahaan tidak terbukti memediasi pengaruh transformasi digital akuntansi terhadap transparansi keuangan. Efektivitas pengawasan administrasi internal cenderung bergerak statis demi pemenuhan regulasi (*checklist compliance*) semata tanpa diimbangi kompetensi teknologi akuntansi yang memadai, sehingga sistem teknologi akuntansi bekerja secara mandiri dalam mendorong transparansi pelaporan tanpa melalui jalur birokrasi tata kelola dewan pengawas.

Reference

1. Alassuli, A., Thuneibat, N. S., Eltweri, A., Al-Hajaya, K., & Alghraibeh, K. (2025). The Impact of Accounting Digital Transformation on Financial Transparency: Mediating Role of Good Governance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jrfm18050272>
2. Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi 2024 (Vol. 7).
3. Baker, J. (2012). The Technology-Organization-Environment Framework. *Springer*, 28(May), 461. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6108-2>
4. Bisnis.com. (2025). Catat! Ini Sektor Usaha yang Tumbuh Tinggi pada 2026 versi Bank Indonesia. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251129/9/1932744/catat-ini-sektor-usaha-yang-tumbuh-tinggi-pada-2026-versi-bank-indonesia>
5. CNBC Indonesia. (2026). Outlook Sektor Logistik, Gambaran Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260108141931-4-700716/outlook-sektor-logistik-gambaran-pertumbuhan-ekonomi-ri-tahun-2026>

6. Cui, L., & Wang, Y. (2023). Can corporate digital transformation alleviate financial distress ? *Finance Research Letters*, 55(PB), 103983. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103983>
7. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management.
8. Fang, Q., Yu, N., & Xu, H. (2023). Governance effects of digital transformation : from the perspective of accounting quality. *China Journal of Accounting Studies*, 11(1), 77–107. <https://doi.org/10.1080/21697213.2023.2148944>
9. Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (10th ed.).
10. IARSI. (2026). IARSI News: NLE: Reformasi Logistik yang Canggih di Atas Kertas, Tapi Masih Tersendat di Lapangan. <https://www.iarsi.org/2026/04/iarsi-news-nle-reformasi-logistik-yang.html>
11. Irmawati, Haliah, & Nirwana. (2025). Digital Transformation of Public Sector Accounting : A Literature Review on Technology Adoption in Government Financial Reporting. 7(2), 228–241.
12. Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Fir : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. 3, 305–360.
13. JieWei, W., JianQiang, C., Li, L., YuZheng, L., Zhenhong, G., & Loang, O. K. (2023). The Impact Of Digital Transformation On Financial Reporting and Analysis In The Accounting Industry. 290–309. <https://doi.org/10.55573/IJAFB.085021>
14. Kemenko Perekonomian. (2023). Layanan National Logistic Ecosystem Terus Dikembangkan Pemerintah untuk Menunjang Keberhasilan Reformasi Logistik 4.0. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5421/layanan-national-logistic-ecosystem-terus-dikembangkan-pemerintah-untuk-menunjang-keberhasilan-reformasi-logistik-40>
15. Kemenko Perekonomian. (2026). Penguatan Ekonomi Digital Indonesia melalui Inovasi Teknologi dalam Bidang Jasa Transportasi Digital. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6874/penguatan-ekonomi-digital-indonesia-melalui-inovasi-teknologi-dalam-bidang-jasa-transportasi-digital>
16. Kementerian Perhubungan RI. (2021). Menhub : Penggunaan Teknologi di Transportasi Tunjang Pembangunan Berkelanjutan. <https://dephub.go.id/post/read/menhub-penggunaan-teknologi-di-transportasi-tunjang-pembangunan-berkelanjutan>
17. Kementrian PANRB. (2024). Menhub Budi Karya Dorong Penguatan Sistem Logistik Nasional lewat Digitalisasi Inaportnet. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menhub-budi-karya-dorong-penguatan-sistem-logistik-nasional-lewat-digitalisasi-inaportnet>
18. Kompasiana. (2025). Belajar dari Kasus PT Garuda Indonesia: Pentingnya Integritas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. <https://www.kompasiana.com/mutia06548/677bec89ed641526f43ddab3/belajar-dari-kasus-pt-garuda-indonesia-pentingnya-integritas-dan-transparansi-dalam-laporan-keuangan>
19. Lathifah, A., & Indriastuti, D. R. (2026). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024. 4(4), 220–230.
20. Liu, Q., & Jiang, X. (2025). Quantitative Measurement of Digital Maturity in Manufacturing Enterprises: An Application Scenario-Based Study. *Sustainability (Switzerland)*, 18(1). <https://doi.org/10.3390/su18010274>
21. Mekari.com. (2026). 18 Contoh Transformasi Digital Perusahaan Indonesia & Global. <https://mekari.com/blog/contoh-transformasi-digital/>
22. OECD. (2005). *Handbook on Constructing Composite Indicators : Methodology and User Guide*.
23. OJK. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/POJK.04/2015. 1–8. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Pedoman-Tata-Kelola-Perusahaan-Terbuka.aspx>
24. OJK. (2019). Siaran Pers : Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero)TBK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx>
25. Oualid, M., Latifa, B., & Zakaria, D. (2021). Impact of Digital Transformation Accounting Information System - Evidence from Alegrian Firms. *International Journal of Advances in Engineering and Management*, 7(3), 765–772. <https://doi.org/10.35629/5252-0703765772>
26. PDI Perjuangan Bali. (2026). Garuda Indonesia Resmikan Modernisasi Sistem Inti Melalui Solusi SAP S4HANA. <https://www.pdiperjuanganbali.id/garuda-indonesia-modernisasi-sistem-inti-sap>
27. PT Blue Bird TBK. (2021). THRIVING BY SHAPING THE MOBILITY AS A SERVICE.
28. Salehi, M., Ammar Ajel, R., & Zimon, G. (2023). The relationship between corporate governance and financial reporting transparency. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(5), 1049–1072. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2021-0102>
29. Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
30. Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). Technological Innovation as a Process. 27–50.
31. Zebua, W. (2025). The Role of Digital Transformation in Accounting Systems for the Transparency and Accountability of MSME Financial Statements. 4(4), 590–598.
32. Zou, L., Li, W., Wu, H., Liu, J., & Gao, P. (2024). Measuring Corporate Digital Transformation: Methodology, Indicators and Applications. *Sustainability (Switzerland)*, 16(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su16104087>